

BAB II

POLITIK MAHASISWA DAN DEKLARASI

A. Sikap

1. Definisi Sikap

Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitude*. *Attitude* adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Banyak sosiolog dan psikolog memberi batasan bahwa sikap merupakan kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya (Howard, 1974:2).

Sementara definisi sikap menurut para ahli hingga saat ini masih banyak berbeda pandangan, yang secara umum pandangan tersebut dibagi kedalam tiga kelompok. Kelompok *pertama* yang diwakili oleh Thurstone, Likert, dan Osgood memandang sikap merupakan bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu obyek, yang dapat berupa mendukung atau memihak maupun tidak mendukung ataupun tidak memihak.

Kelompok *kedua* yang diwakili oleh Chave, Bogardus, LaPiere, Mead, dan Allport memandang sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Kelompok *ketiga* yang diwakili oleh Secord dan Backman memandang sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek (Azwar, 2005:4)

2. Faktor-faktor Pembentuk Sikap

Saifudin Azwar menguraikan faktor pembentuk sikap yaitu: pengalaman yang kuat, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media masa, lembaga pendidikan dan lembaga agama, pengaruh faktor emosional (Azwar, 2011). Sementara itu Sarlito dan Eko juga menjelaskan mengenai pembentukan sikap yaitu: pengondisian klasik, pengondisian instrumental, belajar melalui pengamatan atau observasi dan perbandingan sosial (Wirawan, 1976).

Gerungan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal pembentukan sikap adalah pemilihan terhadap obyek yang akan disikapi oleh individu dan tidak semua obyek yang ada disekitarnya itu disikapi. Faktor eksternal yang membentuk sikap manusia menurut Gerungan dibagi menjadi dua yaitu: Interaksi kelompok dan komunikasi (Gerungan, 2010).

B. Politik

1. Definisi Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *Polis* yang berarti kota yang berstatus negara atau *city state*. Menurut Aristoteles, dalam bukunya berjudul *Politics*, manusia itu secara alamiah adalah makhluk yang berpolitik (*man is by name nature a political animal*) atau "*Zoon Politicon*". Yang dimaksudkan Aristoteles bahwa manusia itu adalah makhluk politik adalah upaya untuk menjelaskan hakikat dari keberadaan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Bilamana terdapat dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain (dalam menjalani kehidupan di dunia), maka mereka tidak luput dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politik (Rasyid, 2017).

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif (Basri, 2011:3). Menurut Andri Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama (Budiardjo, 2007)

Menurut Amin Ibrahim, pengertian politik itu adalah “pengaturan” kekuasaan dalam kehidupan bernegara dengan segala aktivitasnya agar aspirasi masyarakat (rakyat) dapat diwujudkan dalam aturan main/hukum yang jelas. Sementara itu, Miriam Budiardjo ahli ilmu politik terkemuka di Indonesia, menjelaskan bahwa pengertian atau definisi mengenai ilmu politik itu mencerminkan perkembangan pemikiran yang menekankan atau menonjolkan aspek-aspek dari negara, kekuasaan, dan kelakuan politik (Budiardjo, 2007).

Politik dalam bahasa Inggris *politic* yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan (Wojo, 1980). Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik yaitu:

- a) Perkataan “Politik” berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, Negara atau lebih tepat negara kota disebut *polis*. Plato menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan *politea*, dan muridnya bernama Aristoteles menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *politicon*. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara
- b) Politik adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya

- c) Politik berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan.
- d) Dalam arti yang lebih luas politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu (Marbun, 2004:144).

2. Sistem Politik

Menurut David Easton sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resource*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat (Maksudi, 2016:25). Easton juga mengajukan suatu definisi sistem politik yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya yaitu sistem politik menetapkan nilai (dengan cara kebijaksanaan), penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat secara keseluruhan (Sukarna, 1981)

Pendapat lain dinyatakan oleh Gabriel A. Almond bahwa sistem politik menjalankan fungsi-fungsi penyatuan dan penyesuaian (baik kedalam masyarakat itu sendiri maupun kepada masyarakat lain) dengan jalan perbuatan atau ancaman untuk dilaksanakan walaupun agak bersifat paksaan (Sukarna, 1981).

Suatu sistem politik dapat dikatakan selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya (Rusadi, 1977). Almond berpendapat bahwa ada enam kategori kapabilitas sistem politik

yang didasarkan pada klasifikasi *input* dan *output* sistem politik, yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik sebagai berikut:

- a) Kapabilitas Ekstratif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan SDA dan SDM dari lingkungan domestik maupun internasional.
- b) Kapabilitas Distributif, distribusi ini ditujukan kepada individu maupun semua kelompok dalam masyarakat, seolah-olah sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat.
- c) Kapabilitas Regulatif, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok yang berada di dalamnya, maka dibutuhkan pengaturan.
- d) Kapabilitas Simbolik, yaitu ukuran kinerja sistem politik dalam kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik kepada lingkungan intra-masyarakat maupun ekstra-masyarakat. Petunjuk tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukan oleh atau bergantung pada kreasi selektif pihak pemimpin dan pada penimbaan yang penuh olehnya terhadap seperangkat penerimaan atau daya reseptif masyarakat.
- e) Kapabilitas Responsif, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu sistem politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik dari lingkungan intra masyarakat (domestik) maupun ekstra msyarakat (internasional).

f) Kapabilitas dalam negeri dan luar negeri, yaitu ukuran kinerja sistem politik yang merujuk bahwa sejauh mana kapabilitas suatu sistem politik dapat berinteraksi dengan lingkungan domestik dan lingkungan internasional (Maksudi, 2013).

3. Proses Politik

Teori proses politik (*the Political Process Theory*) lebih banyak memfokuskan kepada faktor-faktor yang memungkinkan warga negara biasa membentuk suatu gerakan sosial mereka sendiri yang bertentangan dengan masyarakat yang dominan (Sukmana, 2016). Dengan demikian, proses politik erat kaitannya dengan upaya perubahan sosial. Proses politik (*political process*) adalah mengacu kepada suatu keadaan dimana ketika orang berusaha memperoleh akses pada kekuasaan politik dan menggunakannya untuk kepentingan mereka atau kelompok mereka sendiri (Irianto, 2015).

Menurut Miriam Budiardjo, proses politik adalah pola-pola politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain (Miriam, 2007:15). Sementara itu Gabriel A. Almond mengatakam bahwa proses politik dimulai dengan masuknya tuntutan yang diartikulasikan dan diagregasikan oleh parpol, sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif (Sukmana, 2016).

Pendapat lain yaitu menurut Abercrombie, Hill, dan Tumer, Studi tentang proses politik berfokus pada aktivitas-aktivitas partai dan kelompok-kelompok kepentingan, organisasi-organisasi internal, sifat pembuatan keputusan politik, serta peran dan latar belakang para politisi. Fokus dari teori *Political Oprocess Theory* adalah lebih banyak kepada *political connection* atau koneksi politik (Sukmana, 2016).

4. Sikap Politik

Membahas mengenai sikap politik, maka istilah *political efficacy* adalah istilah yang sering digunakan. *Political efficacy* sendiri terkait dengan konsep umum yang dikemukakan oleh Bandura (1986) tentang *Self efficacy*. *Self efficacy* dapat didefinisikan sebagai penilaian mengenai seberapa baik seseorang dapat menampilkan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi atau tugas tertentu. *Political efficacy* dalam pandangan tradisional adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang dirinya dan kemampuannya untuk mempengaruhi politik pada situasi tertentu.

Political efficacy didefinisikan sebagai perasaan bahwa tindakan individu dalam bidang politik akan membawa, atau akan dapat membawa dampak bagi perusahaan proses politik (Campbell, Gurin dan Miller 1954). *Political efficacy* merupakan persepsi individual apakah seseorang itu dapat mempengaruhi proses kebijakan (Sellingson 1980; Cohen et.al 2000; Fox dan Lawless 2005). *Political efficacy* sebagai kepercayaan seseorang terhadap kemampuannya untuk memahami politik, untuk didengar dan untuk membuat perubahan politik (Catt, 2005).

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Political efficacy*

Wu (2003) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *political efficacy* yaitu:

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan variabel penting yang berhubungan dengan *political efficacy*. Fakta membuktikan secara konsisten bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung untuk berpartisipasi dalam politik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah (Almond & Verba, 1963, Lipset, 1981; Stone & Schaffner, 1998).

b) Informasi Politik

Individu yang memiliki informasi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung lebih mau terlibat dalam politik (Bobo & Gilliam, 1990; Stone & Schaffner, 1988)

c) Gender

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih berpartisipasi dalam politik dibandingkan perempuan (Almond & Verba, 1963; Resenstone & Hansen, 1993). Milbrarth & Goel (1977) mengatakan bahwa laki-laki lebih merasa mampu untuk terlibat dalam politik.